

Reformasi Pertahanan dan Gender

DAFTAR ISI

Mengapa gender penting dalam reformasi pertahanan?

Bagaimana cara gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pertahanan?

Tantangan dan peluang pasca konflik

Pertanyaan-pertanyaan untuk Reformasi Pertahanan

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat mengenai manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi pertahanan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengenalan mengenai isu gender bagi para praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya - *lihat Informasi lebih lanjut*.

Mengapa gender penting dalam reformasi pertahanan?

Reformasi Pertahanan melibatkan transformasi sektor pertahanan negara tertentu sehingga lembaga-lembaga: berada dibawah kontrol sipil; mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan tata kelola pemerintahan yang baik; mempertahankan ukuran pasukan yang tepat; memiliki komposisi yang representatif; terlatih dan memiliki perlengkapan yang sesuai dengan lingkungan strategisnya; dan mematuhi hukum internasional, sehingga berperan dalam mencapai tujuan perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita. Oleh karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Pemaduan gender ke dalam sektor pertahanan meliputi menerapkan pengalaman, pengetahuan dan kepentingan wanita dan pria dalam proses pembuatan kebijakan dan susunan bagi pertahanan negara, pelaksanaan kebijakan tersebut (termasuk operasi nasional maupun internasional) dan penilaian hasilnya. Pemaduan gender dalam proses reformasi pertahanan merupakan alat untuk:

Memberikan respons terhadap kebutuhan keamanan yang berbeda di dalam masyarakat

- Reformasi pertahanan harus memberikan respons yang efektif terhadap kebutuhan semua kelompok di dalam masyarakat. Kebutuhan keamanan seseorang bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti misalnya jenis kelamin, etnis, usia, kemampuan, orientasi seksual, status ekonomi, status kewarganegaraan dan agama.
- Kekerasan berbasis gender (GBV, gender-based violence) tetap menjadi ancaman signifikan bagi keamanan manusia di seluruh dunia. Pria juga



Kotak 1

Pemelihara perdamaian wanita dapat meningkatkan efektivitas misi pemeliharaan perdamaian karena:

- Personil militer wanita dibutuhkan untuk melakukan penggeledahan fisik pada wanita di penghalang jalan, pelabuhan udara, dll.
- Pria dan wanita setempat cenderung menganggap pemelihara perdamaian wanita lebih mudah didekati dibandingkan dengan pemelihara perdamaian pria
- Pemelihara perdamaian wanita dapat secara lebih mudah mengumpulkan informasi dari para wanita setempat, agar memperoleh intelijen yang berharga
- Baik pria maupun wanita yang menjadi korban penganiayaan seksual lebih cenderung mengungkapkan kasus yang dialaminya kepada pemelihara perdamaian wanita
- Pemelihara perdamaian wanita memberikan model peran positif bagi wanita setempat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan

menjadi korban GBV yang berupa pembantaian selektif-jenis kelamin, pemerkosaan, dan kekerasan yang berkaitan dengan geng. Menjamin perlindungan wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki selama maupun pasca-konflik harus diutamakan dalam agenda reformasi pertahanan.

Memberikan respons terhadap perubahan kebutuhan sektor pertahanan

- Sifat peperangan telah mengalami perubahan yang besar pengaruhnya. Kekuatan pertahanan di banyak konteks terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dan pembangunan kembali yang kompleks yang membutuhkan keterampilan seperti komunikasi, fasilitasi dan kerja sama dengan masyarakat sipil. Keanekaragaman komposisi pasukan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai operasi memungkinkan sektor pertahanan melaksanakan tugas-tugas ini dengan lebih baik (lihat Kotak 1).
- Para anggota angkatan bersenjata dapat menjadi para pelaku GBV terhadap masyarakat sipil dan juga anggota angkatan bersenjata lainnya. Pendekatan promosi hak-hak asasi manusia yang mempertimbangkan gender, misalnya melalui pelatihan kepekaan gender dan penegakan kode perilaku, dapat memperkuat pencegahan, respons menyeluruh dan pertanggung-jawaban.

Ciptakan kekuatan pertahanan dan organisasi keamanan yang representatif

- Wanita kurang terwakili di dalam militer, kementerian pertahanan dan badan-badan pengawasan pertahanan. Bahkan tanpa hambatan formal, dalam praktiknya sering terdapat batas maksimum untuk kemajuan karir wanita.
- Pemaduan penuh wanita ke dalam angkatan bersenjata mengoptimalkan kemampuan militer untuk memenuhi perannya dalam perlindungan masyarakat yang demokratis, termasuk pertahanan nilai-nilai intinya seperti kewarganegaraan dan kesetaraan.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa untuk memadukan isu gender ke dalam reformasi pertahanan bukan sekedar masalah efektivitas operasional; pemaduan ini harus mematuhi undang-undang, instrumen hukum, dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen hukum pokok meliputi:

- Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Perkuat pengawasan sipil demokratis atas kekuatan pertahanan

- Aspek pokok dari reformasi pertahanan adalah peningkatan pengawasan sipil. Melibatkan wanita dan pakar gender dalam badan pengawasan pertahanan dapat menjamin kebijakan dan program pertahanan merespons kebutuhan tertentu pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) wanita dapat memberikan pemahaman utuh mengenai keamanan kepada proses-proses pengawasan sipil.

Bagaimana cara gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pertahanan?

Sebaiknya isu-isu gender ditangani pada tingkat reformasi pertahanan politik, lembaga, ekonomi dan sosial.

Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan pada tingkat politik

- Jamin agar para wanita maupun pria yang memiliki keahlian gender, dan wakil-wakil lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas isu-isu mengenai hak-hak wanita, gender dan pemuda menjadi bagian dari badan pengkajian ulang pertahanan.
- Bangun kemampuan gender badan-badan pengkajian ulang pertahanan melalui pelatihan, pengarahan mengenai isu gender dan keamanan, program pendampingan, dll.
- Bangun kemampuan organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk organisasi wanita, mengenai isu kebijakan pertahanan dan pengawasan sektor keamanan. Buat mekanisme untuk meningkatkan keterlibatannya dalam proses-proses reformasi pertahanan.
- Dorong pelaksanaan debat mengenai visi nasional pertahanan dan keamanan melalui:

Kasus Kajian 1

Meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran wanita dalam angkatan bersenjata Hungaria¹

Hungaria berhasil meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan bersenjatanya dari 4,3% pada tahun 2005 menjadi 17,56% pada tahun 2006. Sejak jabatan tempur dibuka bagi wanita pada tahun 1996, wanita dapat menempati semua jabatan dalam angkatan bersenjata Hungaria. Strategi Hungaria untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran personil wanita meliputi:

- Undang-Undang Dinas Militer yang menegakkan hak setara pria dan wanita dan menjamin promosi non-diskriminatif berdasarkan keterampilan profesional, pengalaman, prestasi dan masa tugas.
- Sebuah Tim Persamaan Kesempatan dan Rencana Persamaan Kesempatan dalam (dinas) sumber daya manusia.
- Sebuah Komite Wanita Kekuatan Pertahanan Hungaria yang dibentuk pada tahun 2003 untuk menjamin peluang yang sama bagi pria dan wanita. Komite tersebut melakukan penelitian dan mengadakan pertemuan dengan para personil militer wanita untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman mereka, yang digunakan untuk membuat analisis mengenai status kesetaraan gender, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi perubahan.
- Jaringan staf penghubung wanita dibentuk pada tingkat satuan.
- Langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi tempat istirahat dan kondisi kesehatan di setiap satuan.

Kasus Kajian 2

Kode perilaku Ghana untuk Angkatan Bersenjata dan Pasukan Keamanan²

Ghana secara berkala mengirimkan pasukan untuk misi PBB dan sudah memadukan peraturan PBB yang menetapkan standar perilaku untuk angkatan bersenjata dalam operasi dukungan perdamaian ke dalam kode perilaku nasional mereka:

Eksplorasi dan Penganiaya Seksual – Hal-hal berikut ini harus dihindari:

- Segala imbalan uang, kerja, barang atau jasa untuk hubungan seksual
- Segala jenis kegiatan seksual dengan anak-anak (orang berusia di bawah 18 tahun)
- Segala bentuk penghinaan, pelecehan atau perilaku eksploitatif
- Segala imbalan seksual atas bantuan yang diberikan...
- Segala jenis pelanggaran seksual yang merusak citra, kredibilitas, imparialitas, atau integritas pasukan Anda.

Hubungan Wanita/Pria – Harus didukung terjadinya interaksi yang sehat dan profesional antara pria dan wanita. Tidak didorong terjadinya hubungan tak bermoral di antara personil pasukan.

Aturan untuk Kode Perilaku – Tidak melakukan tindakan tak bermoral seperti penganiaya dan eksploitasi seksual, fisik atau psikologis. Hormati dan hargai hak-hak asasi manusia semua orang.

- Konsultasi dengan masyarakat sipil, yang mencakup organisasi wanita perkotaan dan pedesaan
- Dengar pendapat parlementer dan debat terbuka
- Pengikatan dengan media

Memadukan gender ke dalam reformasi pertahanan pada tingkat lembaga

- Lakukan perekrutan wanita secara aktif ke dalam struktur pertahanan dan pastikan wanita terwakili dalam badan-badan pembuat keputusan pertahanan. Kaji ulang dan mengubah kebijakan yang mengurangi partisipasi wanita dan pria, termasuk pelarangan terhadap wanita menempati jabatan tempur atau mencapai pangkat tertinggi (lihat Studi Kasus 1).
- Laksanakan kebijakan yang ramah keluarga – misalnya cuti maternitas dan paternitas yang memadai dan penyediaan fasilitas perawatan dan penitipan anak.
- Jamin agar pendidikan dan pelatihan militer menangani kepekaan kebudayaan, pertanggungjawaban masyarakat, hak-hak asasi manusia dan ketanggapan terhadap gender.
- Kembangkan, tegakkan dan pantau kode perilaku bagi personil kekuatan pertahanan yang melarang

diskriminasi, pelecehan, eksploitasi dan penganiaya seksual (lihat Studi Kasus 2).

Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan pada tingkat ekonomi

- Lakukan analisis gender terhadap anggaran pertahanan agar meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban dan manajemen keuangan publik sektor pertahanan (lihat Box 2).
- Bangun kemampuan para anggota parlemen dan masyarakat sipil untuk melakukan analisis gender anggaran pertahanan.

Kotak 2

Pertanyaan-pertanyaan dalam proses analisis gender atas anggaran pertahanan:

- Apakah alokasi umum secara setara memberikan keamanan bagi wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan?
- Apakah anggaran menyebutkan dana untuk wanita, pria, anak perempuan atau anak lelaki? (Misalnya, dana untuk merekrut lebih banyak wanita; untuk cuti maternitas dan paternitas; untuk layanan kesehatan pria dan wanita)
- Apakah anggaran menyebutkan kegiatan, masukan dan biaya yang berkaitan dengan gender? (misalnya, pelatihan kesadaran dan sensitisasi gender)

Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan tingkat masyarakat

- Gambarkan anggota kekuatan pertahanan wanita di media supaya agar menyoroti nilai tambahan peran mereka dalam pertahanan, dan mengubah persepsi masyarakat mengenai lembaga pertahanan.
- Jangkai OMS, termasuk organisasi wanita, yang mengerjakan isu-isu perdamaian dan keamanan, agar mendapat pemahaman yang mendalam serta intelijen dan membuka jalur-jalur kerja sama.

Tersedia juga di Alat (Tool) 3...

- Kiat bagaimana cara memadukan gender ke dalam proses kajian ulang pertahanan
- Cara-cara yang dapat dipakai para anggota parlemen yang memantau reformasi pertahanan
- Kiat bagaimana cara meningkatkan perekrutan dan retensi wanita
- Contoh-contoh bagaimana cara isu-isu gender sudah ditangani dalam reformasi pertahanan di Republik Demokratis Kongo, Estonia, Fiji, Amerika Latin, Africa Selatan dan Swedia

Tantangan dan peluang pasca konflik

Reformasi pertahanan adalah aspek penting dalam stabilisasi pasca-konflik. Dalam banyak kasus, perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) para bekas penempur menjadi prioritas yang mendesak. Karena wanita adalah partisipan sekaligus korban dari konflik, kebutuhan dan peran khusus mereka harus diperhatikan dan partisipasi penuh mereka dijamin dari permulaan proses perdamaian dan selama proses DDR dan RSK.

Peluang bagi pemaduan isu gender

- Konsultasi secara luas, yang meliputi organisasi-organisasi wanita, mengenai pertahanan dan RSK membantu membentuk konsensus nasional mengenai prioritas reformasi.
- Para 'Pendukung gender' pria dalam militer dan jabatan berpengaruh lainnya dapat menjadi mitra perubahan yang berpengaruh.
- Proses penyaringan untuk tentara nasional baru mendapatkan manfaat dari konsultasi dengan kelompok-kelompok wanita dan wanita yang bekas penempur, yang dapat memberikan informasi mengenai para pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dalam proses-proses DDR:

- Seharusnya pakar gender terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
- Semua staf DDR harus mendapat pelatihan yang berkaitan dengan isu-isu gender sehingga mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan menilai

program dengan cara yang sensitif gender.

- Seharusnya data yang dipisahkan menurut gender dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun gambaran yang jelas mengenai bekas penempur masing-masing, tanggungan mereka, dan orang lain yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata.
- Seharusnya organisasi wanita diberikan informasi mengenai aspek teknis dan prosedural dari proses DDR untuk menjamin agar para wanita berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memahami hak-hak mereka.
- Prakarsa-prakarsa dapat diambil untuk merekrut para bekas penempur wanita ke dalam kekuatan pertahanan.

? Pertanyaan-pertanyaan untuk Reformasi Pertahanan

Gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pertahanan agar meningkatkan efektivitasnya. Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk ditanyakan dalam proses penilaian, pemantauan dan evaluasi meliputi:

- Apakah sudah ada konsultasi untuk menjamin agenda reformasi pertahanan mencerminkan kebutuhan wanita dan pria yang terpinggirkan? Apakah OMS dilibatkan dalam proses Kaji Ulang Pertahanan?
- Apakah ada prakarsa-prakarsa untuk membangun kapasitas gendernya badan-badan kaji ulang pertahanan, para anggota parlemen dan OMS yang terlibat dalam pengawasan pertahanan, seperti pelatihan gender dan pengarahan mengenai isu-isu gender dan keamanan?
- Apakah target-target ditetapkan dan mekanisme ditentukan untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan wanita di dalam kerangka pertahanan termasuk angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan?
- Apakah ada langkah-langkah yang nyata, termasuk kode perilaku dan mekanisme pemantauan dan pelaporan, untuk mencegah, merespons dan mengenakan sanksi atas pelecehan seksual dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan personil pertahanan?
- Apakah isu-isu gender dipadukan ke dalam pelatihan standar untuk personil pertahanan pada semua tingkat? Apakah pelatihan tentang kesadaran gender serta eksploitasi dan penganiayaan seksual mutlak bagi semua personil? Apakah pria terlibat dalam pemberian pelatihan? Sejauh mana pelatihan tersebut disumberdayakan?
- Apakah perlindungan wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan terhadap semua bentuk GBV selama maupun pasca-konflik diprioritaskan dalam agenda reformasi pertahanan?
- Apakah analisis gender atas anggaran pertahanan sudah dilakukan?

Informasi lebih lanjut

Sumber daya

Anderlini, S.N. bersama Conaway, C.P. – *Negotiating the Transition to Democracy and Transforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women* (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan Mentransformasi Sektor Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan), 2004.

Committee on Women in the NATO Forces (Komite Urusan Wanita dalam Pasukan NATO)– *CWINF Guidance for NATO Gender Mainstreaming* (Panduan CWINF untuk Pengarusutamaan Gender NATO), 2007.

DPKO (Departemen Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB) – *Gender Resource Package* (Paket Sumber Daya Gender), 2004.

UN-INSTRAW – *Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (UN SCR 1325)*, 2006.

UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan) – *Getting it Right, Doing it Right: Gender and Disarmament, Demobilisation and Reintegration* (Dapatkan dengan Benar, Lakukan dengan Benar: Gender dan Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi), 2004.

Organisasi-organisasi

ACCORD – www accord.org.za

DCAF – www dcaf.ch

Institute for Security Studies – www issafrica.org/

Siyanda: Mainstreaming Gender Equality (Pengarusutamaan Kesetaraan Gender) – www.siyanda.org

UN-INSTRAW – www.un-instraw.org

Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
2. Reformasi Kepolisian dan Gender
3. Reformasi Pertahanan dan Gender
4. Reformasi Peradilan dan Gender
5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender
6. Manajemen Perbatasan dan Gender
7. Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender
9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender
10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan Praktik ini disiapkan oleh Mugiho Takeshita, DCAF, berdasarkan pada Alat (Tool) 3, para penulis Cheryl Hendricks dan Lauren Hutton dari Institut Kajian Keamanan.

¹ Committee on Women in the NATO Forces and the Women's Research & Education Institute (Komite Urusan Wanita dalam Pasukan NATO dan Institut Penelitian dan Pendidikan Wanita), 'Percentages of Female Soldiers in NATO Countries' Armed Forces' ('Persentase Prajurit Wanita dalam Angkatan Bersenjata Negara-negara NATO'), dan 'Hungarian National Report for 2006' ('Laporan Nasional Hungaria tahun 2006').

² Kutipan dari penyajian Klutsey, E.A. (Kol.) mengenai Kode Perilaku Ghana, disampaikan pada Rapat Persiapan mengenai Rancangan Kode Perilaku Angkatan Bersenjata dan Pasukan Keamanan Afrika Barat, Okt. 2005, pp. 24-26.
http://www.dcaf.ch/awg/ev_accra_051024_presentation_Klutsey.pdf

